

LAPORAN PKM

Workshop & Story Grant Jurnalisme Keberagaman: Mengembangkan Ruang Aman Keberagaman di Media, Balikpapan, Kalimantan Timur, 17-19 Desember 2021

Ahmad Junaidi

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara

Surel: ahmadd@fikom.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian yang dilakukan peneliti dari Universitas Tarumanagara (UNTAR) dan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang didukung Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun 2018 dan 2019 tentang kecenderungan pemberitaan media daring dalam isu keberagaman menunjukkan media kerap menjadikan kelompok minoritas sebagai objek pemberitaan yang mengedepankan sensasi. Bagaimana orang muda di Kalimantan Timur (Kaltim) menyikapi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok marjinal yang ada di sekitar? Apa yang bisa orang muda dorong bersama-sama di era revolusi industri 4.0 agar media, baik mainstream maupun media sosial, lebih ramah terhadap komunitas-komunitas rentan?

Pendahuluan

Dalam analisis konten pemberitaan yang dilakukan Remotivi kerja sama dengan International Media Support (IMS) terhadap media daring dan televisi (*Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, 2021) maupun riset UNTAR-SEJUK-Kemenristekdikti sama-sama menyimpulkan bahwa liputan isu keberagaman tidak banyak mewakili suara-suara kelompok rentan. Media lebih memberi tempat bagi narasumber elit seperti para pejabat, aparat, dan tokoh agama yang mewakili organisasi-organisasi keagamaan dari kelompok mayoritas.

Sebagai provinsi yang telah ditetapkan menjadi ibu kota baru negara ini, Kalimantan Timur tahun lalu sempat disorot sebagai wilayah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di seluruh Kalimantan. Pendataan aplikasi Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan (2020) rintisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim didominasi lingkungan terdekat korban, yakni lingkaran keluarga.

Di wilayah yang dikenal dengan sebutan Benua Etam ini publik Indonesia pernah dikejutkan dengan aksi terorisme. Empat anak menjadi korban luka bakar bom di gereja Oikumene Samarinda pada 13 November 2016. Luka serius berakibat salah satu dari mereka meninggal dunia esok harinya.

Lantaran gereja-gereja di Kaltim kerap sulit mendapat izin mendirikan rumah ibadah, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kaltim mengadukan hal ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) pada Juni 2021 lalu yang diterima oleh Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin. Tak bisa dipungkiri, diskriminasi dan intoleransi menimpa warga nonmuslim di provinsi yang menurut Sensus Penduduk 2020 dihuni oleh 87,39% warga beragama Islam, 7,53% Kristen, 4,41% Katolik, 0,43 Buddha, 0,22 Hindu, dan 0,02 % Konghucu dan lainnya.

2018 lalu pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota di Kaltim juga sempat sibuk menerbitkan aturan diskriminatif yang melarang LGBT. Mengikuti isu yang sempat “heboh” di Garut, Jawa Barat, tentang keberadaan grup Facebook gay, Balikpapan pun latah “memerangi” realitas ragam gender dan seksualitas yang sejatinya di bumi nusantara sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka keberadaan minoritas gender dan seksual sudah diakui, bahkan menyatu dalam budaya, seperti pada konteks Bugis di Sulawesi Selatan, keberadaan Bisu sangat dimuliakan.

Celakanya, pemberitaan isu-isu keberagaman gender dan seksualitas di Kaltim banyak yang turut menebalkan stigma dan merendahkan martabat warga minoritas gender dan seksual. Begitupun pemberitaan tentang perkosaan, tidak sedikit media yang menggunakan judul dan diksi-diksi bombastis, mengobyektivikasi korban, sehingga dapat memperdalam traumanya

Pelaksanaan Kegiatan

Dialog antara jurnalis dengan kelompok minoritas ini diikuti juga perwakilan disabilitas, Sugianto dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Balikpapan dan Jamaluddin Feeli dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Balikpapan. Sesi ini digelar di Balikpapan, Kaltim, sebagai rangkaian Workshop & Story Grant Jurnalisme Keberagaman: Mengembangkan Ruang Aman Keberagaman di Media, 17-19 Desember 2021.

Diskusi tentang media dan LGBTIQ menjadi perdebatan yang sangat hidup selama proses workshop. Kesalingan membuka diri, baik di kalangan jurnalis dan komunitas LGBTIQ menjadi jalan keluar yang perlu dibangun agar media dapat menjalankan perannya dalam mengedukasi publik dan mengawasi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak segenap warga dan manusia yang hidup di Indonesia.

Melalui kegiatan ini Dwi Setyaningsih Halid, salah satu jurnalis peserta workshop, merasa memperoleh bekal untuk menulis isu gender dan seksualitas dengan lebih berhati-hati. Bagaimanapun, di Kalimantan Timur tidak banyak komunitas LGBTIQ yang berani terbuka kepada publik, apalagi kepada wartawan.

“Penggunaan diksi dalam memberitakan LGBT jangan sampai menguatkan stigma dan kebencian terhadap mereka,” ucap perempuan yang akrab disapa Disya merefleksikan proses workshop yang diikutinya.

Di penghujung workshop para peserta mempresentasikan proposal liputannya masing-masing kepada Tim SEJUK. Proses SEJUK meng-*coaching* rencana liputan dari 20 peserta

ini adalah upaya mendiskusikan agar ketika proposal mereka diturunkan menjadi berita sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme keberagaman

Berikut ini dokumentasi kegiatan:

